

## The Purpose of Sister City Collaboration between Malang and Fuqing, China

### Motif Kerja Sama Sister City Kota Malang dan Kota Fuqing, Tiongkok

Aminatus Soleha<sup>1</sup>, Chelsi Okmelita Purnomo<sup>2</sup>, Radias Dwi Cahyani<sup>3</sup>,  
Karolita Mariana<sup>4</sup>, Ario Bimo Utomo<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

#### Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi motif-motif di balik kerja sama antara Malang dan Fuqing, Tiongkok. Melalui pendekatan MRQ, penelitian ini menganalisis bagaimana motif pendidikan muncul sebagai respons terhadap praktik terbaik dari Fuqing dalam pengelolaan pendidikan yang efektif. Selain itu, penelitian ini juga menemukan motif agrikultur yang didorong oleh potensi besar yang dimiliki oleh Fuqing sebagai penghasil kedelai, yang sejalan dengan karakteristik Kota Malang sebagai penghasil tempe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama antara Malang dan Fuqing didorong oleh kebutuhan dan potensi yang nyata di kedua kota tersebut. Penelitian ini berhasil menjawab pertanyaan penelitian (MRQ) nomor 3 yang mengenai kerja sama antarkota melalui kacamata motif kerja sama. Implikasi dari penelitian ini memiliki dampak signifikan dalam memperkuat pemahaman tentang dinamika kerja sama antarkota, serta memberikan pandangan yang lebih luas tentang pentingnya kolaborasi lintas wilayah dalam memajukan pembangunan lokal.

**Kata-Kata Kunci:** Sister City, Paradiplomasi, Malang, Fuqing.

#### Abstract:

This study aims to explore the motifs behind the collaboration between Malang and Fuqing, China. Through the MRQ approach, this research analyzes how the motif of education emerges as a response to Fuqing's best practices in effective educational management. Furthermore, the study also identifies agricultural motifs driven by the significant potential of Fuqing as a soybean producer, aligning with Malang's characteristics as a tempeh producer. The results of the study indicate that the collaboration between Malang and Fuqing is driven by the real needs and potentials in both cities. This study successfully addresses research question (MRQ) number 3 regarding intercity cooperation through the lens of collaboration motifs. The implications of this research have a significant impact on strengthening the understanding of the dynamics of intercity cooperation, as well as providing a broader perspective on the importance of cross-regional collaboration in advancing local development.

**Keywords:** Sister City, Paradiplomacy, Malang, Fuqing.

---

#### Korespodensi:

Ario Bimo Utomo (ariobimo@upnjatim.ac.id)

## Pendahuluan

Paradiplomasi, atau diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kian menjadi fenomena yang lazim. Seiring dengan berkembangnya dinamika politik dan ekonomi global, perhatian terhadap fenomena paradiplomasi semakin meningkat. Paradiplomasi, sebagai praktik di mana entitas-entitas sub-nasional seperti wilayah otonom, provinsi, atau kota terlibat dalam aktivitas diplomasi dan hubungan internasional secara langsung, telah menjadi semakin lazim dan penting dalam konteks global saat ini. Fenomena ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam studi hubungan internasional, yang mengakui peran semakin penting dari aktor-aktor non-negara dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri. Dalam konteks ini, penelitian tentang paradiplomasi menjadi semakin mendesak untuk memahami dampaknya terhadap dinamika politik, ekonomi, dan sosial di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Paradiplomasi, sebuah konsep yang semakin menjadi fokus perhatian dalam hubungan internasional, menunjukkan peran penting aktor-aktor di bawah tingkat negara, seperti tingkat provinsi atau kota, dalam membangun dan mendukung kerja sama internasional. Istilah ini berasal dari kata Yunani "para," yang berarti "selain," "bersama," atau "subsidi," yang mencerminkan diplomasi yang dilakukan oleh aktor di bawah tingkat negara untuk mendukung atau melengkapi diplomasi yang diatur oleh pemerintah negara. Globalisasi dan kemajuan teknologi telah memungkinkan aktor-aktor ini untuk membentuk agenda global dengan perspektif lokal mereka (Intentilia & Surya Putra, 2021).

Mukti (2020) menjelaskan bahwa aktor-aktor paradiplomasi yang melibatkan pemerintah daerah ke ranah internasional merupakan konsep yang mengubah kerangka kedaulatan negara di mana kekuasaan tidak hanya terpusat di pemerintah pusat, melainkan juga dapat terbagi ke aktor-aktor sub-negara. Meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat, pembagian kekuasaan ini menciptakan dinamika di tingkat sub-negara yang berkontribusi pada keseluruhan struktur kebijakan dan tata kelola negara, serta memberikan ruang bagi otonomi yang sah bagi daerah atau sub-pemerintah untuk membangun kolaborasi yang terarah dan mendalam, serta menjadikan pemerintah daerah sebagai pemerintah yang independen (Mukti, 2020).

Sebagai salah satu bentuk praktik paradiplomasi yang nyata, sister city atau kota kembar memiliki model kerjasama yang menghubungkan dua kota dari negara yang berbeda, dengan tujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan hubungan antarmasyarakat masing-masing kota. Program ini juga dikenal dengan istilah town twinning. Aktivitas sister city mencakup berbagai aspek, mulai dari kerja sama untuk mempromosikan persahabatan, investasi, pendidikan, budaya, hingga berbagai aspek lainnya (Sompotan, 2016).

Kerja sama antara dua kota melalui program sister city dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi kedua belah pihak. Pertama-tama, kerja sama ini dapat membuka peluang bagi pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara kedua kota, yang dapat memperkaya dan memperluas wawasan serta kapasitas masing-masing. Misalnya, kota-kota tersebut dapat saling belajar tentang praktik terbaik dalam pengelolaan lingkungan, infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik lainnya.

Selain itu, kerja sama ini juga dapat menjadi peluang bagi pengembangan ekonomi lokal melalui promosi perdagangan dan investasi lintas batas. Dengan menjalin hubungan yang erat antara pelaku bisnis dan pemerintah lokal dari kedua kota, dapat terjadi peningkatan arus perdagangan, investasi, dan pariwisata yang saling menguntungkan. Ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi langsung bagi kedua kota, tetapi juga dapat membuka pintu bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah yang lebih luas.

Selain itu, kerja sama sister city juga dapat memperkuat hubungan antarmasyarakat, baik melalui pertukaran budaya, seni, maupun olahraga. Melalui program pertukaran siswa, seniman, atlet, dan warga lainnya, dapat tercipta ikatan yang lebih kuat antara kedua kota, yang pada gilirannya dapat membantu mempromosikan pemahaman dan toleransi lintas budaya.

Namun demikian, untuk memaksimalkan potensi kerja sama ini, diperlukan komitmen yang kuat dan kerjasama yang erat antara pemerintah dan masyarakat lokal dari kedua kota. Diperlukan juga perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif dari berbagai program dan kegiatan yang telah disepakati, serta evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan dan manfaat kerja sama dapat tercapai dengan baik.

Dengan demikian, melalui kerja sama paradiplomasi berbasis sister city, kedua kota dapat memperkuat hubungan bilateral mereka, memperluas jaringan kerjasama, dan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk pertumbuhan

Aminatus Soleha, Chelsi Okmelita Purnomo, Radias Dwi Cahyani, Karolita Mariana, Ario Bimo Utomo dan kemakmuran bersama. Sebagai bagian dari fenomena globalisasi yang semakin berkembang, kerja sama antarkota ini dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan di tingkat lokal dan global.

Dalam konteks pendidikan, misalnya, kerjasama sister city dapat mencakup pertukaran siswa dan guru antar sekolah, penyelenggaraan program pertukaran pelajar, serta pembangunan fasilitas pendidikan bersama. Melalui kerjasama semacam ini, kedua kota dapat saling belajar dan memperkaya pengalaman pendidikan mereka, sambil memperluas wawasan siswa dan guru mengenai budaya dan kehidupan di negara mitra.

Sementara itu, dalam aspek budaya, kerjasama sister city sering kali melibatkan pertukaran seni dan budaya, penyelenggaraan festival atau pameran seni bersama, serta pembangunan infrastruktur budaya seperti museum atau pusat seni. Dengan demikian, kerjasama budaya melalui sister city tidak hanya memperkaya kehidupan budaya masyarakat di kedua kota, tetapi juga memperkuat hubungan antarmasyarakat dan mempromosikan saling pengertian dan toleransi antarbudaya.

Meskipun pembangunan ekonomi sering menjadi fokus utama dalam kerjasama sister city, tidak bisa diabaikan bahwa sektor-sektor seperti pendidikan dan budaya memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat hubungan antarkota yang berkelanjutan dan berdampak positif. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah di Indonesia untuk memperhatikan dan memperkuat aspek-aspek ini dalam perencanaan dan pelaksanaan kerjasama sister city mereka.

Salah satu kerja sama kota bersaudara atau antarkota di daerah Jawa Timur adalah Sister City Malang-Fuqing. Kerja sama yang terjalin antara kedua kota ini merupakan bentuk kolaborasi yang melibatkan pihak-pihak di tingkat sub-negara dari negara yang berbeda. Dalam artikel Antara Jatim News yang diterbitkan pada 17 April 2017, kerja sama ini dimulai ketika rombongan kota Malang yang pada 15 Desember 2015 berkunjung ke kota Fuqing untuk melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU), dengan acuan pada rekomendasi dari sektor perantauan di Fuqing, sepakat untuk memperkuat hubungan kerjasama dan ikatan kolaboratif yang memberikan manfaat kepada kedua kota ini (Sukarelawati & Munir, 2017).

Dalam makalah ini, kami akan mengeksplorasi fenomena paradiplomasi Malang dan Fuqing menggunakan metode Multiple Response Questions (MRQ) yang dikembangkan Alexander Kuznetsov (2014) dalam karyanya *Theories and Practices of Paradiplomacy*. Dalam konteks studi paradiplomasi, MRQ dapat digunakan untuk menganalisis studi-studi kasus yang berbeda berdasarkan poin fokus yang ingin ditelaah. Beberapa pertanyaan menarik yang muncul adalah (1) Apa penyebab munculnya aktivitas paradiplomasi di wilayah yang sedang diteliti? (2) Apa landasan hukum dari aktivitas paradiplomasi wilayah yang sedang diteliti? (3) Apakah motif utama dari aktivitas paradiplomasi dari wilayah yang sedang diteliti? (4) Bagaimanakah paradiplomasi dilembagakan di wilayah yang sedang diteliti? (5) Bagaimana sikap pemerintah pusat terhadap paradiplomasi entitas penyusunnya? (6) Apakah dampak paradiplomasi terhadap pembangunan wilayah yang sedang diteliti?

Adapun, dalam makalah ini kami memfokuskan pembahasan pada MRQ ketiga, yakni motif utama aktivitas paradiplomasi yang tengah diteliti. Dengan mengambil pertanyaan tersebut, kami berupaya menginvestigasi motif utama apa yang kemudian melandasi adanya kerja sama sister city yang lebih mendalam antara Malang dan Fuqing.

Dalam proses penelitiannya, metode MRQ seperti yang digunakan makalah ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang motivasi di balik kerja sama antarkota Malang dan Fuqing. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan memahami motivasi, persepsi, dan pengalaman secara detail dari para pemangku kepentingan yang terlibat dalam kerja sama ini.

Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang lebih kaya dan kontekstual tentang dinamika yang terjadi di lapangan. Dengan melakukan wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, observasi partisipatif, dan analisis dokumen, peneliti dapat menangkap nuansa yang mungkin terlewatkan jika hanya mengandalkan data kuantitatif. Hal ini sangat penting dalam konteks penelitian ini karena motif dan dinamika kerja sama antarkota dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang kompleks dan beragam, seperti budaya, kebijakan lokal, dan hubungan interpersonal antaraktor yang terlibat.

Selain itu, pendekatan kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial, politik, dan ekonomi yang melingkupi kerja sama

Aminatus Soleha, Chelsi Okmelita Purnomo, Radias Dwi Cahyani, Karolita Mariana, Ario Bimo Utomo antarkota ini dengan lebih baik. Dengan menggali informasi dari berbagai sumber dan memeriksa berbagai sudut pandang, peneliti dapat membangun pemahaman yang komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dan dinamika kerja sama antarkota Malang dan Fuqing.

Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat menangkap berbagai aspek penting dari kerja sama antarkota ini, termasuk pemahaman tentang motif di balik kerjasama dalam bidang pendidikan dan agrikultur. Dengan mendengarkan langsung dari para pemangku kepentingan, peneliti dapat mengidentifikasi tema-tema umum, tren, dan perbedaan dalam persepsi dan pengalaman mereka terkait dengan kerja sama ini.

### **Praktik Paradiplomasi Indonesia**

Sebelumnya, Indonesia berada di bawah rezim Orde Baru Soeharto, yang mana Konstitusi Indonesia “disakralkan” sehingga mengkritik Soeharto sama dengan mengkritik Konstitusi. Hal ini berdampak pada legitimasi pemerintahan otoriter Soeharto selama 32 tahun (Hutagalung 2017). Pada era ini, Indonesia merupakan negara sentralistik dimana kekuasaan terkonsentrasi di tangan Presiden dan pembangunan berdasarkan otonomi daerah tidak mendapat tempat dalam realitas politik di Indonesia. Namun, pada tahun 1998, pemerintahan Suharto runtuh setelah krisis di Asia dan membawa reformasi terhadap cara pandang Indonesia terhadap kekuasaan negara.

Dari aspek desentralisasi, Indonesia melahirkan otonomi daerah yang kemudian menjadi tahapan selanjutnya setelah fragmentasi pasca berakhirnya rezim Orde Baru (Harakan dkk 2021). Otonomi daerah pada era reformasi merupakan jawaban atas tuntutan masyarakat yang lazim muncul pada masa Orde Baru, seperti permasalahan pembangunan yang tidak merata, pemerintahan yang terlalu sentralistik, dan tidak efektifnya birokrasi. Ketentuan pertama mengenai desentralisasi ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Peraturan ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk menyesuaikan dengan perkembangan negara, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sejak jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dalam struktur politik dan administratifnya. Salah satu konsep utama yang muncul setelah era Orde Baru adalah konsep otonomi daerah, yang memberikan wewenang lebih besar kepada pemerintah daerah

Aminatus Soleha, Chelsi Okmelita Purnomo, Radias Dwi Cahyani, Karolita Mariana, Ario Bimo Utomo dalam mengelola sumber daya dan kebijakan di tingkat lokal. Otonomi daerah menjadi dasar bagi terbentuknya praktik-praktik paradiplomasi yang semakin berkembang di berbagai daerah di Indonesia.

Otonomi tersebut juga hadir dalam bentuk keleluasaan untuk melakukan internasionalisasi. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), dan ayat (2), tersirat bahwa hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek internasional yang dilakukan oleh pemerintah di suatu negara. tingkat nasional dan subnasional. Tingkat daerah yang dimaksud dalam peraturan ini adalah kota, kabupaten, dan provinsi.

Melalui otonomi daerah, provinsi ataupun kabupaten dan kota yang memiliki potensi dan peluang yang unik dapat mengembangkan paradiplomasi, khususnya dalam konteks investasi dan promosi wilayah. Paradiplomasi kini pun lazim digunakan untuk menarik investasi, yang mencakup berbagai kegiatan untuk menarik investasi, mempromosikan potensi wilayah, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.

Berbeda dari diplomasi tradisional, paradiplomasi seperti dalam bentuk sister city adalah kegiatan yang sifatnya kontekstual. Hal ini berarti satu negara dan negara lain akan memiliki praktik yang berbeda. Sebagaimana disampaikan dalam Utomo (2022), paradiplomasi adalah hasil dari transformasi fungsi-fungsi negara yang kian berubah seiring adanya globalisasi. Pada akhirnya, ini akan menghasilkan produk hukum yang berbeda satu sama lain.

Berbeda dengan diplomasi tradisional, di mana aturan dan etika seringkali lebih terstandarisasi dan terpusat sesuai dengan politik luar negeri di tingkat nasional, paradiplomasi mengakomodasi keragaman praktik dan kebutuhan di tingkat lokal. Hal ini terutama terlihat dalam kerjasama sister city di mana aturan dan kebijakan yang dihasilkan dapat sangat berbeda dari satu kota kembar ke kota kembar lainnya. Dalam konteks paradiplomasi, pengembangan produk hukum seperti peraturan daerah, perjanjian kerjasama, dan kebijakan investasi dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kepentingan masing-masing kota atau wilayah. Misalnya, dua kota kembar yang memiliki fokus ekonomi yang berbeda dapat menghasilkan peraturan yang berbeda pula dalam hal insentif investasi, pajak, atau perizinan usaha.

Di sisi lain, diplomasi tradisional lebih mengikuti kerangka hukum internasional dan nasional yang lebih seragam, meskipun masih ada ruang untuk negosiasi dan penyesuaian sesuai dengan konteks tertentu. Namun,

Aminatus Soleha, Chelsi Okmelita Purnomo, Radies Dwi Cahyani, Karolita Mariana, Ario Bimo Utomo paradiplomasi memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi entitas lokal untuk menciptakan aturan dan praktik yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembangunan mereka.

Pada konteks Indonesia, aktivitas sister city diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 193/1652/PUOD, diterbitkan pada tanggal 26 April 1993. Produk hukum inilah yang menjadi acuan dalam kerjasama sister city di Indonesia. Pedoman ini mengatur tentang Tata Cara Pembentukan Hubungan Kerjasama Antar Kota (Sister City) dan Antar Provinsi (Sister Province) dalam dan luar negeri. Meskipun konsep Sister City di Indonesia lebih menekankan pada pembangunan ekonomi, namun sektor-sektor seperti pendidikan dan budaya tetap dianggap sebagai isu yang penting dalam skema Sister City (Kerjasama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri (KSDPL), 2019).

Surat Edaran ini memberikan panduan dan kerangka kerja yang jelas bagi pemerintah daerah dalam menjalin hubungan sister city. Hal ini mencakup prosedur pembentukan hubungan sister city, tanggung jawab masing-masing pihak, serta ruang lingkup kerjasama yang diharapkan. Selain itu, surat edaran tersebut juga menekankan pentingnya memperhatikan aspek-aspek seperti keterlibatan masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, dan pelaksanaan program-program konkret yang dapat menghasilkan manfaat yang nyata bagi kedua belah pihak yang terlibat.

Dalam pelaksanaannya, paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Indonesia diawasi oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri. Kedua menteri berkoordinasi dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaannya. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa lembaga negara dan lembaga pemerintah yang mempunyai rencana untuk mengadakan perjanjian internasional wajib terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan menteri terkait.

Dengan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tersebut di atas disebutkan pula bahwa daerah otonom dapat melaksanakan kerja sama luar negeri sebagaimana tercantum dalam Pasal 42 ayat (1). Di sana disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi memberikan persetujuan atas kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam penjelasan pasal tersebut juga ditegaskan bahwa selain kegiatan kota kembar atau provinsi, pemerintah daerah juga dapat membuat “perjanjian kerja sama teknis yang meliputi bantuan kemanusiaan, kerja sama penerusan pinjaman dan

Aminatus Soleha, Chelsi Okmelita Purnomo, Radias Dwi Cahyani, Karolita Mariana, Ario Bimo Utomo hibah, kerja sama penyertaan modal, dan kerja sama lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.” (Mukti 2014)

### **Prioritas Pembangunan Kota Malang**

Sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur, Kota Malang terus menerapkan berbagai upaya untuk mempercepat pembangunan guna mendorong kemajuan dan perkembangan kota. Dalam konteks ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang diformulasikan sebagai pengejawantahan visi dan misi kota tersebut. Program-program yang dijalankan oleh Kepala Daerah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Malang tahun 2005-2025, dengan memperhatikan secara khusus RPJM Nasional.

Selain itu, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 juga telah diuraikan, yang akan mencakup empat MISI sebagai tujuan utama untuk mengarahkan langkah-langkah pembangunan Kota Malang. Rencana pembangunan kota Malang terfokus pada empat misi pembangunan. Yang pertama adalah jaminan akses dan kualifikasi pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya bagi seluruh warga. Dalam konteks ini, pembangunan akan lebih difokuskan pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), meningkatkan aksesibilitas, dan meratakan pelayanan, baik di bidang pendidikan maupun kesehatan. Selain itu, upaya juga akan dilakukan untuk memastikan akses pelayanan publik yang merata bagi semua warga kota Malang.

Kedua adalah realisasi wacana kota produktif dan berdaya saing dalam basis industry kreativitas, berintegrasi dan berkesinambungan. Dalam konteks ini, pembangunan akan lebih difokuskan pada peningkatan produktivitas dan daya saing, pengembangan infrastruktur, serta penataan ruang yang teratur dan berwawasan lingkungan. Selanjutnya, penyelenggaraan kota rukun dan toleran yang berbasis pada keberagaman dan berpihak kepada masyarakat rentan dan kesetaraan gender. Dalam konteks ini, Pemerintah mengorganisasikan penyelenggaraan dengan memberikan prioritas pada usaha meningkatkan harmoni antar pemeluk agama, perlindungan bagi masyarakat yang rentan, pemberdayaan gender, dan keserasian sosial. Terakhir, merespons kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah yang diselenggarakan dengan keteraturan hukum, profesionalisme, dan akuntabilitas. Dalam konteks ini, pemerintah terus berkomitmen untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan

Aminatus Soleha, Chelsi Okmelita Purnomo, Radias Dwi Cahyani, Karolita Mariana, Ario Bimo Utomo meningkatkan kualitas pelayanan publik agar bersifat profesional dan akuntabel, dengan fokus pada kepuasan warga.

Sebagai langkah konkret dalam mempercepat pembangunan, Pemerintah Kota Malang telah memulai kemitraan dengan berbagai pihak. Salah satu contohnya adalah kerjasama dengan Pemerintah Kota Fuqing, Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Bukti dari kerjasama ini terlihat melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dalam program sister city yang sukses dilakukan pada tanggal 17 April 2023, di ruang sidang Kantor Walikota Malang. Walikota Malang, H. Moch. Anton, secara langsung menandatangani MoU bersama Walikota Fuqing, Zhang Fan, dihadiri oleh Wakil Walikota Malang dan perwakilan dari kedua daerah tersebut.

Kerjasama sister city ini mencakup beberapa sektor, termasuk pendidikan, pariwisata, kebudayaan, dan perdagangan. Pada sektor pendidikan, kerjasama akan menjadi prioritas utama dalam upaya percepatan pembangunan Kota Malang. Ini melibatkan program pertukaran pelajar, pendidikan vokasi, inklusif, dan model sekolah lainnya. Kota Malang, sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur, juga memiliki destinasi pariwisata yang beragam. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Malang ingin menekankan kerjasama dalam bidang pariwisata dan budaya bersama dengan Fuqing. Diketahui bahwa Fuqing, selain memiliki populasi sekitar 1,35 juta jiwa dan sumber daya alam yang berkualitas, juga merupakan salah satu daerah di Tiongkok yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan. Kerjasama ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan di Kota Malang dan memberikan dampak positif bagi kedua daerah, mencapai tujuan bersama secara efektif.

### **Pemilihan Fuqing sebagai Mitra Kerja Sama**

Berdasarkan penelitian penulis, Malang memilih Fuqing yang terdapat di Tiongkok karena sistem pendidikan Tiongkok yang bersifat terencana dengan baik, dimulai dari tingkat pusat hingga provinsi, kotamadya, kabupaten, dan wilayah otonom sejajar dengan kotamadya. Pengelolaan pendidikan di wilayah ini lebih difokuskan pada pengembangan potensi individu siswa. Untuk mencegah penumpukan nalar, siswa tidak dipaksa untuk menghafal dan tidak ditekan untuk lulus ujian kognitif. Pendidikan Tiongkok juga terdiri dari 4 sektor, diantaranya (1) basic education (pendidikan dasar), (2) technical & vocational

Aminatus Soleha, Chelsi Okmelita Purnomo, Radias Dwi Cahyani, Karolita Mariana, Ario Bimo Utomo education (pendidikan teknik dan kejuruan), (3) higher education (pendidikan tinggi), dan (4) adult education (pendidikan dewasa) (Yudi, A, Bekti, & Sugandi). Selain pada 4 sektor tersebut juga terdapat pendidikan non-formal seperti pendidikan literasi guna menghilangkan buta huruf.

Manajemen pendidikan di Tiongkok, terutama di Kota Fuqing, dinilai memiliki standar tinggi karena menerapkan kurikulum yang lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan siswa dan memberikan perhatian yang besar terhadap kesejahteraan tenaga pengajar. Selain itu, ada lembaga pengaturan pendidikan negara (state education commission) yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan regulasi pendidikan. Bandingkan dengan sistem pendidikan di Indonesia, khususnya di Kota Malang, terdapat perbedaan yang mencolok. Manajemen pendidikan di Malang belum mencapai standar tinggi yang sama dengan Kota Fuqing. Melalui kerjasama sister city ini, diharapkan manajemen pendidikan Kota Malang dapat lebih terstruktur, terarah, dan berkelanjutan. Agenda kerjasama antara Kota Malang dan Kota Fuqing mencakup pertukaran pelajar, yang dijadwalkan setiap tahun, bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan fasilitas.

Dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya dan percepatan pertumbuhan pembangunan, Pemerintah Kota Malang menerapkan kebijakan kerjasama. Melalui kemitraan sister city dengan Kota Fuqing, Republik Rakyat Tiongkok, yang ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), terdapat kolaborasi di berbagai sektor, dengan penekanan khusus pada sektor pendidikan yang diutamakan (malangkota.go.id, 2017). Sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya, kerjasama ini membawa sejumlah agenda peningkatan dalam sektor pendidikan. Upaya tersebut mencakup pengembangan pendidikan inklusif, peningkatan sektor pendidikan vokasi, pengembangan model sekolah, penyediaan tenaga pengajar, dan pelaksanaan pertukaran pelajar (Mulyanor, Khairi, Sari, & Zhafira). Pengimplementasian kerjasama tersebut didasarkan pada kerjasama ini terwujud berka standar pendidikan tinggi di Kota Fuqing, yang menjadi pendorong utama pelaksanaannya. Secara empiris sistem dan standar pendidikan yang ada di Tiongkok menjadi yang terbaik di dunia.

Hal ini menegaskan bahwa sektor pendidikan menjadi fokus utama dalam kerjasama sister city antara Malang dan Fuqing. Dengan banyaknya institusi pendidikan di Malang, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat sektor pendidikan.

Aminatus Soleha, Chelsi Okmelita Purnomo, Radias Dwi Cahyani, Karolita Mariana, Ario Bimo Utomo

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Malang tidak hanya melalui program-program tersebut, tetapi juga melibatkan pelatihan Bahasa Mandarin yang telah disepakati oleh kedua pemerintah. Pemerintah Kota Fuqing berkomitmen mengirimkan tenaga pengajar untuk memberikan pelatihan Bahasa Mandarin di Kota Malang. Agenda ini ditujukan terutama untuk wirausaha yang ingin memasarkan produknya secara internasional. Harapannya, sektor pendidikan yang menjadi prioritas dalam kerjasama sister city ini dapat mengembangkan sistem pendidikan, meningkatkan kualitas, dan menciptakan manfaat berkelanjutan bagi kedua belah pihak. Semua agenda yang telah disepakati diharapkan mampu memberikan perubahan yang signifikan dan memberikan manfaat bagi kedua kota.

Selanjutnya, motif lain yang muncul dalam rancangan kerja sama antara Kota Malang dan Fuqing adalah sektor agrikultur. Peran sektor agrikultur menjadi signifikan mengingat kedua kota memiliki potensi dan karakteristik yang saling melengkapi dalam bidang ini.

Kota Malang, sebagai salah satu kota penting di Jawa Timur, terkenal dengan peranannya dalam sektor agrikultur, terutama dalam produksi tempe. Tempe, sebagai makanan tradisional Indonesia yang sangat populer, merupakan salah satu komoditas utama yang diproduksi di Kota Malang. Proses produksi tempe membutuhkan bahan baku utama berupa kedelai, dan ketergantungan Kota Malang terhadap pasokan kedelai dari luar negeri, terutama dari Amerika Serikat, telah menjadi perhatian utama dalam upaya menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan produksi tempe di wilayah tersebut.

Di sisi lain, Kota Fuqing di Tiongkok memiliki potensi besar sebagai penghasil kedelai. Fuqing dikenal sebagai salah satu daerah yang subur dan menghasilkan sejumlah besar kedelai setiap tahunnya. Kedelai yang dihasilkan di Fuqing memiliki kualitas yang baik dan jumlah produksi yang cukup untuk memenuhi permintaan baik di tingkat lokal maupun nasional.

Kemunculan kerja sama ini diawali oleh pernyataan Gubernur Jawa Timur, Soekarno, mengenai kebutuhan impor kedelai untuk Jawa Timur. Pemerintah provinsi berencana mengimpor 48 ribu ton kedelai dari Amerika Serikat. Fattah Jasin, Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Setdaprov Jatim, mengonfirmasi adanya kekurangan pasokan dengan produksi kedelai tahun 2017 hanya 342 ribu ton, sementara konsumsi mencapai 448 ribu ton, menyebabkan defisit sebesar 105 ribu ton. (Radar Surabaya, 2018).

Ketergantungan Kota Malang, sebagai penyedia kedelai Jawa Timur, terhadap impor kedelai dari Amerika Serikat telah menjadi fokus perhatian yang semakin mendalam bagi para pembuat kebijakan di wilayah tersebut. Sebagai salah satu kota terkemuka di Jawa Timur, Kota Malang memiliki industri tempe yang sangat berkembang, yang membutuhkan pasokan kedelai yang stabil dan memadai untuk mempertahankan produksinya.

Namun, kondisi pasokan yang tidak memadai dan harga yang fluktuatif telah menjadi tantangan serius bagi industri tersebut. Menyadari pentingnya stabilitas pasokan kedelai untuk industri tempe lokal, Pemerintah Kota Malang telah mencari solusi melalui kerjasama dengan kota lain, termasuk melalui kemitraan sister city dengan Fuqing. Keputusan untuk menjadikan Fuqing sebagai sister city pada tahun 2017 merupakan langkah strategis yang diharapkan dapat memotong jalur suplai yang panjang dan tidak efisien, serta meningkatkan ketersediaan dan stabilitas pasokan kedelai.

Kampung Wisata Anam melaporkan bahwa Pemerintah Kota Malang memilih Fuqing sebagai sister city pada tahun 2017 dengan tujuan memotong jalur panjang suplai kedelai. Keterkaitan antara keduanya sebagai sister city diharapkan dapat membuat pasokan kedelai di Malang menjadi lebih konsisten dan stabil. Hal ini memiliki potensi untuk menurunkan harga, mengingat jalur impor yang lebih singkat dapat dipangkas.

Kepala Dinas Perindustrian Kota Malang, Subkhan, menyoroti ketergantungan industri tempe Sanan pada impor kedelai. Data terbaru dari Dinas Perdagangan Kota Malang mencatat harga kedelai impor berkisar antara Rp 9.500 hingga Rp 10 ribu per kilogram di pasar tradisional Kota Malang. Diperkirakan, pengrajin tempe di Sentra Industri Sanan membutuhkan antara 8 sampai dengan 10 ton kedelai setiap harinya. Ketergantungan Kota Malang pada impor kedelai dari Amerika Serikat masih berlanjut, dan kolaborasi dengan Kota Fuqing dalam penyediaan kedelai dapat menjadi opsi pengganti. Dengan demikian, Kota Malang memiliki peluang untuk diversifikasi pasokan kedelai dan memenuhi kebutuhannya melalui kemitraan dengan berbagai pihak. (Khairi, Mulyanor, Sari, & Zhafira, 2021).

Fuqing memiliki sumber daya alam yang melimpah, salah satunya adalah kedelai yang diantisipasi akan berperan sebagai pemasok untuk memenuhi kebutuhan kedelai tempe di Malang. Praktik sister city yang terjadi antara Malang dan Fuqing pada bidang ekonomi khususnya perdagangan ialah agar

Aminatus Soleha, Chelsi Okmelita Purnomo, Radias Dwi Cahyani, Karolita Mariana, Ario Bimo Utomo menjadikan Fuqing sebagai salah satu supplier kebutuhan kedelai bagi pengrajin tempe di Malang.

Secara keseluruhan, kerjasama antara Kota Malang dan Fuqing dalam hal pasokan kedelai memiliki potensi besar untuk meningkatkan stabilitas dan ketahanan pangan, serta memperkuat hubungan antar-kota di tingkat internasional. Namun, untuk mengoptimalkan potensi ini, perlu adanya komitmen yang kuat dan tindakan konkret dari semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, Kota Malang dapat melangkah menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan sejahtera bagi seluruh masyarakatnya.

Kerjasama antara Malang dan Fuqing dalam sektor agrikultur, khususnya terkait dengan produksi kedelai, memiliki potensi untuk memberikan manfaat yang signifikan bagi kedua belah pihak. Pertama, kerjasama ini dapat membantu mengurangi ketergantungan Kota Malang terhadap impor kedelai dari Amerika Serikat, yang rentan terhadap fluktuasi harga dan pasokan. Dengan menjalin kerjasama dengan Fuqing untuk memasok kedelai, Kota Malang dapat mengamankan pasokan bahan baku untuk industri tempe lokalnya, sehingga meningkatkan stabilitas produksi dan harga.

Selain itu, kerjasama ini juga dapat membuka peluang bagi pertukaran pengetahuan dan teknologi antara kedua kota dalam hal praktik pertanian yang efisien dan berkelanjutan. Pengalaman Fuqing dalam mengelola produksi kedelai dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi petani di Kota Malang untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian mereka. Di sisi lain, Kota Malang juga dapat membagikan pengetahuan dan teknologi terkait dengan pengolahan kedelai menjadi produk tempe yang berkualitas tinggi kepada pihak-pihak terkait di Fuqing, sehingga membantu meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk agrikultur dari kedua kota.

Kerjasama ini juga memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di kedua kota. Dengan meningkatkan produksi dan nilai tambah produk agrikultur seperti kedelai dan tempe, kedua kota dapat membuka peluang bagi investasi dan pengembangan industri agrikultur yang lebih lanjut. Ini dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan petani, serta mendiversifikasi perekonomian lokal ke sektor-sektor terkait yang lebih maju dan berdaya saing.

Tidak hanya itu, kerjasama dalam sektor agrikultur juga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan mempromosikan pertanian berkelanjutan. Dengan

Aminatus Soleha, Chelsi Okmelita Purnomo, Radias Dwi Cahyani, Karolita Mariana, Ario Bimo Utomo memperkenalkan praktik pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, kedua kota dapat membantu mengurangi dampak negatif dari aktivitas pertanian terhadap lingkungan, seperti degradasi tanah, pencemaran air, dan hilangnya habitat satwa liar.

Dalam rangka mencapai potensi penuh dari kerja sama ini, penting bagi kedua kota untuk menetapkan kerangka kerja yang jelas dan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan program-program yang telah disepakati. Ini termasuk penyusunan rencana kerja bersama, alokasi sumber daya yang memadai, serta pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kemajuan dan dampak kerja sama tersebut.

Dengan demikian, kerja sama antara Kota Malang dan Fuqing dalam sektor agrikultur memiliki potensi untuk memberikan manfaat yang besar bagi kedua belah pihak, baik dalam hal menjaga ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, maupun mempromosikan pertanian berkelanjutan. Dengan memanfaatkan potensi yang ada dan menjalin kerjasama yang erat, kedua kota dapat bersama-sama mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat mereka.

## Penutup

Dalam kesimpulan makalah ini, dapat disimpulkan bahwa kerja sama antara Kota Malang dan Fuqing terjadi atas dasar dua motif utama, yaitu pendidikan dan agrikultur. Kerja sama pendidikan muncul karena adanya best practice dari Fuqing sebagai kota dengan pengelolaan pendidikan yang baik, yang menjadi inspirasi bagi Kota Malang untuk meningkatkan kualitas pendidikan di wilayahnya. Sementara itu, kerja sama dalam bidang agrikultur muncul karena potensi Fuqing sebagai kota penghasil kedelai, yang sejalan dengan karakteristik Malang sebagai penghasil tempe.

Dalam konteks penelitian ini, terdapat keberhasilan dalam menjawab MRQ nomor 3 yang menyoroti kerja sama antarkota melalui kaca mata motif kerja sama. Dengan memahami motif-motif tersebut, dapat disimpulkan bahwa kerja sama antara Malang dan Fuqing bukan hanya sekedar pertukaran simbolik atau formalitas, melainkan didorong oleh kebutuhan dan potensi yang nyata di kedua kota tersebut.

Melalui kerja sama ini, diharapkan dapat terjadi pertukaran pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat, baik dalam bidang pendidikan maupun agrikultur, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif bagi

Aminatus Soleha, Chelsi Okmelita Purnomo, Radias Dwi Cahyani, Karolita Mariana, Ario Bimo Utomo perkembangan dan kesejahteraan masyarakat di kedua kota tersebut. Selain itu, kerja sama ini juga menjadi contoh konkret bagaimana kolaborasi antarwilayah dapat menjadi solusi bagi tantangan dan kebutuhan yang kompleks, seperti ketahanan pangan dan peningkatan kualitas pendidikan.

Dengan demikian, diharapkan kerja sama antara Kota Malang dan Fuqing dapat terus diperkuat dan dikembangkan ke depannya, dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan potensi masing-masing kota serta memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh masyarakat.

## Pendanaan

Penelitian ini tidak mendapatkan dana dari pihak manapun.

## Daftar Pustaka

- Anam, C. (2017). Pemkot Malang - Fuqing RRT Kerja Sama 'Sister City'. (N. Editor, Editor) Diakses dari <https://surabaya.bisnis.com/read/20170418/531/761609/pemkot-malang-fuqing-rrt-kerja-sama-skema-sister-city>
- Harakan, A., Mustari, N., Kinyondo, A. A., & Jermisittiparsert, K. (2021). How do Local Governments Communicate and Facilitate the Implementation of Investment Paradiplomacy?. *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry*, 12(6).
- Intentilia, A. M., & Surya Putra, A. (2021). From Local to Global: Examining Sister City Cooperation as Paradiplomacy Practice in Denpasar City, Bali, Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 1-11.
- Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri (KSDPL). (2019, September 16). Diakses dari Bagian Kerja Sama Kota Bandung Website: <https://kerjasama.bandung.go.id/ksln/ksdpl>
- Khairi, N. F., Mulyanor, A., Sari, F. W., & Zhafira, N. (2021). Layu Sebelum Berkembang: Studi Kasus Kerjasama Sister City Malang dengan Fuqing dalam Komoditas Kedelai. *Global Focus*, 1, 56-71.
- Kuznetsov, A. (2014). *Theory and practice of paradiplomacy: Subnational governments in international affairs*. Routledge.
- Malangkota.go.id. (2017, April 18). Pemerintah Kota Malang. Retrieved 12 13, 2023, from <https://malangkota.go.id/2017/04/18/kota-malang-jalin-kerjasama-sister-city-dengan-kota-fuqing/>

- Aminatus Soleha, Chelsi Okmelita Purnomo, Radias Dwi Cahyani, Karolita Mariana, Ario Bimo Utomo Mukti, T. A. (2014). Sistem Pasca Westphalia, Interaksi Transnasional dan Paradiplomacy. *Jurnal Hubungan Internasional*, 2(2), 175-183.
- Mukti, T. A. (2020). Politik Paradiplomasi dan Isu Kedaulatan di Indonesia.
- Mulyanor, A., Khairi, N. F., Sari, F. W., & Zhafira, N. (2021). Layu Sebelum Berkembang: Studi Kasus Kerjasama Sister City Malang dengan Fuqing dalam Komoditas Kedelai. 1, 56-71.
- Radarsurabaya. (2018). Jatim Datangkan 48 Ribu Ton Kedelai dari Amerika Serikat. Retrieved 12 12, 2023, from <https://radarsurabaya.jawapos.com/ekonomi/77951371/jatim-datangkan-48-ribu-ton-kedelai-dari-amerika-serikat>
- Sompotan, H. (2016). Implikasi Hukum Perjanjian Internasional Dalam Kerjasama Kota Kembar (Sister City) Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum*, 2-17.
- Sukarelawati, E., & Munir, A. (2017, April 17). Pemkot Malang-Fuqing RRT Tanda Tangani MoU "Sister City". Diakses dari Antara Jatim: <https://jatim.antaranews.com/berita/196171/pemkot-malang-fuqing-rrt-tanda-tangani-mou-sister-city#:~:~Pada%2015%20Desember%202015%20rombongan,kedua%20belah%20pihak%20ucapnya>.
- Utomo, A. B. (2022). Paradiplomacy as the product of state transformation in the era of globalisation: the case of Indonesia. *JANUS. NET*, 13(1), 63-78.
- Yamin, M., & Utami, A. T. (2016). Towards Sister City Cooperation between Cilacap and Mueang Chonburi District. In *Innovation in Regional Public Service for Sustainability (ICPM 2016)* (pp. 400-403). Atlantis Press.
- Yudi, A, M. F., Bekti, H., & Sugandi, Y. S. (2020, July 2). Manajemen Pendidikan Di Negara Cina. *Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi*, 17.